

# **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA DAN KELURAHAN (SI- DALEH) DI DESA RAPAK LAMBUR KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

**Arib Hilmy Raihan<sup>1</sup>**  
**Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si<sup>2</sup>**  
**Melati Dama, S.Sos., M.Si<sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa rapak Lambur diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima yang dilakukan dengan lebih cepat, tepat, akurat, murah dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis model interaktif dan untuk menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling dimana yang menjadi narasumber adalah Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan masyarakat Desa Rapak Lambur. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur sejauh ini sudah sangat efektif. Hal ini dilihat berdasarkan fokus Penelitian yang meliputi pengukuran tingkat efektivitas menurut Siagian dimana pengukuran efektivitas meliputi: Sumber daya, dana dan fasilitas penunjang, mutu, jumlah barang atau jasa, batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, dan tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan. Selain itu faktor penghambat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur yaitu, anggaran oprasional dan pengembangan aplikasi.*

***Kata Kunci:*** *Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh), Efektivitas, Kebijakan.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [aribhilmyray@gmail.com](mailto:aribhilmyray@gmail.com)

<sup>2</sup> Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## Pendahuluan

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang mengharapkan terwujudnya efisien dan efektif diberbagai negara di dunia saat ini. Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan mobilitas orang, benda, dan informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat serta mampu menjangkau wilayah secara luas dan tanpa batas. Bahkan telah terjadi konvergensi teknologi antara teknologi komputer, elektronika, telekomunikasi dan penyiaran, dimana seakan-akan tidak mengenal batas-batas geografis nasional (Dimiyati,1997:28).

Era globalisasi telah tiba, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology/ICT*) telah berkembang luas, dimana tidak terbatas pada bidang-bidang industri dan perdagangan saja, namun juga bidang-bidang lainnya seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, tenaga kerja dan sebagainya. Penggunaan ICT sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan sistem manual dan cara tradisional, sehingga banyak negara dan hampir seluruh negara didunia telah menggunakan informasi, komunikasi, dan teknologi dalam melaksanakan berbagai sistem di negaranya, terutama yang terkait dengan sistem pemerintahan.

Di Indonesia inisiatif kearah *e-Government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri.

Menurut Inpres tersebut, “Pengembangan *e-Government* merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien”. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan *e-Government* ini, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan *e-Government* dengan memberikan arahan tentang penyusunan rencana strategis *e-Government* kepada seluruh instansi pemerintah sesuai dengan konteks masing-masing lingkungan instansi tersebut. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional.

Penerapan *e-Government* tentu diberlakukan juga di wilayah Kabupaten di Indonesia, salah satu daerah di Kalimantan Timur yang turut mengembangkan *e-Government* adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka atas dasar Inpres tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 44 Tahun 2009 tentang pengembangan *e-*

*Government* di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara guna menjadi dasar pelaksanaan pengembangan *e-Government* di wilayah tersebut.

Semangat peraturan bupati Nomor 44 tahun 2009 pada dasarnya adalah sebuah dorongan untuk melakukan pengembangan *e-Government* yang tentunya menunjang pelayanan bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan nilai-nilai lainnya yang menunjang proses pelayanan yang optimal dan berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Melihat berbagai manfaat yang didapat melalui penerapan *e-Government* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapannya merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima yang dilakukan dengan lebih cepat, tepat, akurat, murah dan transparan.

Berdasarkan gambaran yang sudah penulis kemukakan berkaitan dengan masalah di atas dan juga implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2009 tentang Pengembangan *e-Government*, maka penulis dalam penelitian ini akan berusaha melakukan analisa terkait Efektivitas Kebijakan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh), di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Efektivitas***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Menurut Siagian (2004:151) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Berarti, efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal, yaitu:

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi,
2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan,
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan,
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

### ***Pendekatan efektivitas***

Gibson dalam buku Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan Tujuan  
Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan.
2. Pendekatan Teori Sistem  
Teori sitem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi.
3. Pendekatan *Multiple Constituency*  
Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.

### ***Kebijakan***

#### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno, 2016:18) istilah kebijakan (*policy term*) disamping digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai suatu yang “terjadi” terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah dipaparkan diatas, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

### ***E-Government***

Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan *e-Government* menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dalam hal ini sebagai organisasi kekuasaan harus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan seharusnya dapat menerapkan berbagai hal, termasuk di dalam penerapan *e-Government* yang menyediakan layanan dalam bentuk elektronik.

Layanan elektronik harus didukung dengan desain operasional departemen khusus yang bertanggung jawab dan terjalannya intergrasi antara departemen dengan departemen lain di pemerintah guna mengakses pelayanan informasi untuk pelayanan masyarakat.

Definisi lain *e-Government* diberikan oleh Zweers dan Planque seperti yang dikutip oleh Richardus E.Indrajit yaitu: “Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh

pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan” (dalam Indrajit, 2002:3).

### ***Jenis-jenis e-Government***

Penerapan *e-Government* memiliki beberapa jenis dalam memberikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam mengkategorikan jenis-jenis *e-Government* tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama. Aspek tersebut meliputi :

1. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan
2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya. (Indrajit, 2004:29).

### ***Pelaksanaan Pengembangan e-Government***

Berdasarkan peraturan bupati nomor 44 tahun 2009, pelaksanaan pengembangan *e-Government* di kantor Camat Tenggarong melalui prosedur pelaksanaan pengembangan *e-Government* meliputi:

- a. Pengadaan: Pengadaan adalah perlengkapan sarana dan prasarana yang menghubungkan antar pemerintah/birokrasi melalui media teknologi berbasis internet.
- b. Keamanan: Keamanan adalah menjaga kerahasiaan informasi data yang diolah pemerintah yang bukan untuk konsumsi masyarakat umum dan keamanan dari segi terlindungnya *software* dan *hardware* dari berbagai macam gangguan virus yang diserahkan kepada tenaga ahli dalam bidang informasi telematika.
- c. Internet dan Intranet: Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP dan Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal 1) Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten. 2) Apabila memiliki website yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Diskominfo. Penggunaan internet, tele dan video *conference* serta e-mail dilingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara hardcopy.
- d. Pengembangan: Pengembangan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan *e-Government* selalu di *update* mengikuti perkembangan zaman dimana selalu dibutuhkan alat-alat baru untuk memudahkan pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Diskominfo.

- e. Database: *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan system informasi dan aplikasi. Pengembangan *Database Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Diskominfo.
- f. Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia menyangkut kinerja aparatur sipil yang bekerja dalam ranah pemerintahan khususnya peningkatan sumber daya manusia yang berada di bidang Teknologi Informasi.

### ***Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh)***

#### ***Pengertian Si-Daleh***

Menurut (Nasuha, 2015:2-5) Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) adalah mekanisme akurasi dan sinkronisasi data kependudukan serta pelayanan publik dengan melakukan pemotretan dan pendataan ulang warga secara langsung dari semua RT di Kantor kelurahan. Sehingga dengan tersusunnya sistem tersebut akan lebih baik dengan merujuk pelayanan yang berbasis teknologi sehingga memudahkan dalam penyimpanan data kependudukan serta pelayanan yang disatukan dalam proses pelayanan tersebut.

Inovasi dalam penerapan aplikasi Si-Daleh mencakup 2 area yang saling berkaitan. Area tersebut adalah:

#### 1. Penataan Tata Laksana.

Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan mekanisme kerja dan prosedur dalam inovasi seksi pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui area ini adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan.

#### 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai dalam program inovasi ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparansi, cepat, tepat, sederhana, aman terjangkau dan memiliki kepastian).
- b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan dari penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) merupakan sebuah tujuan yang memiliki jangka panjang untuk melanjutkan secara konsisten peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, mudah dan memuaskan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 tahun 2009 tentang Pengembangan *e-Government*.

Dasar hukum aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) dituangkan dalam Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2009 tentang

*pengembangan e-Government* dalam pasal 3 yang berbunyi “dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Diskominfo untuk disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*”.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang di teliti.

Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

### ***Fokus Penelitian***

1. Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara menurut teori Siagian meliputi:
  - a. Sumber Daya
  - b. Mutu, Jumlah barang atau jasa dan Batas waktu menghasilkan barang atau jasa
  - c. Tata cara yang harus ditempuh
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Hasil Penelitian**

### ***Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur***

#### ***Sumber Daya***

Sumber Daya sebagai salah satu kriteria efektivitas adalah salah satu daya dukung yang menjadi sebuah titik acuan dimana dalam orientasi kerja sumber daya juga meliputi: dana, sarana dan prasarana, yang penggunaannya sudah ditentukan dan dibatasi. Sumber daya merupakan sorotan utama, guna mengukur tingkat efektivitasan kerja pada bidang tertentu. Sumber daya selain merupakan sorotan utama juga merupakan komponen penting dalam melihat tingkat keefektivasan kerja, dimana dari pemanfaatan sumber daya yang ada akan dapat dilihat tingkat efektivitasan kerja pada suatu bidang. Dalam penelitian ini

sumberdaya dibagi menjadi 2 yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, Sarana dan Prasarana.

### *Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini adalah sumber daya yang berkaitan dengan kinerja pegawai desa, pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Kemampuan aparatur desa sebagai sumber daya tentu sangat dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh), eektivitas aplikasi ini akan terjadi jika aparatur desa paham terhadap prosedur pengelolaan aplikasi Si-Daleh tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ramijo selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rapak Lembur, tentang pemahaman apratur desa terhadap penerapan aplikasi Si-Daleh terebut, beliau menyatakan bahwa :

”Kami disini menjalankan aplikasinya saja sesuai dengan usernya, kalau masalah teknis tentang aplikasi ini yang mengurus diskominfo. Kalau teman-teman aparatur desa disini sudah tau prosedur penjalanan aplikasinya karena waktu update pertama kali saya kumpulkan staf-staf kasi pemerintahan di ruang kepala desa untuk penyampaian pengoprasian aplikasi si-daleh karena ada dua versi kemaren. Jadi jika kita berbicara tentang pemahaman para aparatur desa disini terutama staf kasi pemerintahan sudah paham betul prosedur-prosedur yang ada dalam pengelolaan aplikasi ini. Satu lagi mas karena kami sudah sangat paham prosedurnyan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami lakukan dengan dengan baik dan juga dengan cepat”. (Hasil wawancara Tanggal 19 April 2017)

Pandangan masyarkat terkait pemahaman aparatur desa terhadap aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh), di sampaikan oleh bapak Suwarjo dalam wawancara dengan penulis beliau mengungkapkan bahwa :

“Karyawan atau pegawai disini semuanya bisa melayani kami jika memutuhkan surat pengantar untuk membuat KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain, yaa kami rasa mereka tentu paham ya, kan itu adalah kerjaan mereka setiap hari. Sejauh ini para pegawai desa juga baik dan cepat dalam melayani kami, karena kalo mereka masih tidak paham tentang Aplikasi itu tentu tidak secepat sekarang proses pembuatan surat-surat yang kami butuhkan. Kami juga merasa sangat terbantu karena cepat sekali pelayanan yang di berikan kantor desa ini. Pegawai desa disini semuanya bisa membantu tapi kalau yang utamanya pegawai saja sudah cukup untuk melayani kami”. (Hasil wawancara Tanggal 19 April 2017)

Masyarakat Desa Rapak Lambur beranggapan bahwa pelaksanaan aplikasi Si-Daleh dapat dioprasikan oleh semua pegawai kantor desa Rapak Lambur, mereka selalu dilayani dengan cepat dan mudah oleh pegawai kantor desa yang ada. Masyarakat desa Rapak Lambur merasa terbantu dan termudahkan oleh

pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor desa Rapak Lambur. Kemudian pandangan lain dari masyarakat desa Rapak Lambur yaitu bapak Syamsul Hadi terkait tentang efektifitas Aplikasi Si-Daleh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tempo hari saya ingin mengurus surat pengantar dan kebetulan staf dikasi sedang tidak ada tetapi saya tetap dilayani oleh beberapa staf lain yang kebetulan berada di kantor. Dan tidak lama saya menyatakan surat apa yang mau saya ajukan untuk di buat ternyata berapa menit saja sudah selesai surat pengantar yang saya perlukan tersebut”. (Hasil wawancara Tanggal 31 Mei 2017)

Para aparat atau pegawai di kantor Desa Rapak Lambur sudah bisa mengoperasikan aplikasi Si-Daleh dan berkaitan dengan itu dapat diartikan bahwa keefektivitasan dari segi sumber daya manusia khususnya pegawai kantor Desa Rapak Lambur sudah memenuhi standar efektif karena semua pegawai di kantor tersebut sudah dapat mengoperasikan Aplikasi Si-Daleh.

#### *Sumber Daya Dana dan Fasilitas Penunjang*

Pendanaan aplikasi Si-Daleh menggunakan anggaran APBD namun Kepala Seksi Pemerintahan menuturkan bahwa apabila APBD kurang maksimal untuk membiayai pelaksanaan aplikasi Si-Daleh maka Anggaran Dana Desa dapat di gunakan untuk melakukan pembiayaan tersebut agar aplikasi Si-Daleh dapat tetap diterapkan untuk menunjang kinerja pelayanan kantor desa Rapak Lambur kepada masyarakat desa.

Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) sebagai sarana mempermudah pelayanan sejauh ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta fungsinya. Sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan untuk menunjang proses efektivitas kerja dari sistem ini dari wawancara penulis dengan Kepala Desa Rapak Lambur beliau menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kami menilai bahwa aplikasi Si-Daleh ini sangat menunjang proses pelayanan, pelayanan administrasi kepada masyarakat jadi cepat dan mudah. Dukungan sarana seperti *wi-fi* dan perangkat komputer tentu sangat dibutuhkan, sejauh ini sarana dan prasarana kita di kantor sangat mendukung pelaksanaan aplikasi Si-Daleh dan sejauh ini sarana dan prasarana yang ada sudah sangat cukup”. (Hasil wawancara Tanggal 11 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak apratur desa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa prosedur penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) sudah sangat di pahami oleh aparatur desa, karena sebelum penerapan aplikasi ini telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur desa terutama kepada staf kasi pemerintahan Desa Rapak Lambur, masyarakat juga menganggap bahwa sejauh ini penerapan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) mempercepat proses pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kejelasan penggunaan anggaran sebagai salah satu komponen sumber daya juga sudah terlihat, dimana pembiayaan aplikasi ini

dibebankan kepada penerimaan kas desa melalui Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), yang pada tahun ini pemerintah desa rapak lambur menganggarkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- untuk biaya pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh). Selain itu berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pendukung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) telah tercukupi dimana pemerintah desa memiliki berbagai perangkat berupa jaringan *wi-fi*, paket kartu halo, dan perangkat komputer.

### ***Mutu, Jumlah Barang Atau Jasa dan Batas Waktu Menghasilkan Barang Atau Jasa***

Mutu, jumlah barang atau jasa sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran mutu, jumlah barang dan jasa mencakup pada keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

Mutu, jumlah barang atau jasa yang peneliti maksud adalah seberapa maksimalnya pelayanan yang diberikan kantor desa setelah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) meliputi batas waktu pelayanan, jumlah pelayanan yang di hasilkan dalam sehari, dan jumlah server yang aktif. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara terkait jumlah mutu barang dan jasa yang dihasilkan oleh apratur desa Rapak Lambur Setelah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) dengan Kepala Desa Rapak Lambur beliau menyatakan bahwa :

“Sejauh ini data terkait seberapa banyak masyarakat di desa Rapak Lambur yang sudah merasakan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) belum kami rekap, namun saat ini setiap pelayanan yang ada menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh). Jika di lihat jumlah mutu dan barang atau jasa yang di hasilkan presentasinya sudah sangat tinggi mas, yaa sekitar 95 % menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh). /(Hasil wawancara Tanggal 11 April 2017)

Setelah menggunakan aplikasi Si-Daleh peningkatan barang yang dihasilkan berupa surat pengantar untuk masyarakat meningkat signifikan menjadi 95% daripada sebelum menggunakan aplikasi tersebut, hal ini dikarenakan pegawai kantor Desa Rapak Lambur dapat menghemat waktu dengan mudahnya penggunaan aplikasi ini. Apabila membuat surat pengantar dengan cara manual pegawai membutuhkan waktu yang relatif lama dan proses pembuatan dan bisa memakan waktu sehari-hari dan akibatnya masyarakat menunggu lama untuk surat pengantar yang mereka ingin buat dikantor desa.

Mutu dari hasil surat pengantar yang dihasilkan setelah menggunakan aplikasi Si-Daleh terlihat lebih baik dan tidak ada kecacatan pada format surat

pengantar yang dibuat dengan aplikasi Si-Daleh, hal ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan ketika meninjau hasil Surat pengantar yang di cetak oleh kantor Desa Rapak Lambur yang memberikan Demo untuk pencetakan Surat pengantar. Hal ini lebih efektif dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi Si-Daleh, dimana surat yang dihasilkan dengan cara manual mempunyai persentasi 50% melakukan kesalahan dibanding dengan menggunakan aplikasi Si-Daleh dimana format surat yang dihasilkan sudah tertampil dan terprogram secara otomatis yang akan meminimalisir kesalahan dalam percetakan dan pembuatan surat pengantar untuk masyarakat Desa Rapak Lambur.

Masyarakat menyatakan bahwa pihak kantor desa Rapak Lambur tidak membatasi jumlah pelayanan permohonan surat pengantar kepada masyarakat. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk mengajukan surat pengantar sebanyak yang mereka mau pada hari itu. Pegawai kantor desa Rapak Lambur meelayani semua permohonan surat pengantar pada 1 hari dimana apabila masyarakat mengajukan surat permohonan maka ada hari itu pula surat pengantar itu sudah bisa digunakan dan dihasilkan oleh pegawai kantor Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh).

### ***Tata Cara yang harus ditempuh***

Tata cara yang harus di tempuh sebagai salah satu indikator efektivitas merupakan langkah untuk mendorong keefektivitasan sebuah program, tata cara yang harus ditempuh dalam penelitian ini yakni menyangkut perumusan, dan sosialisasi terkait tata cara apakah telah dilakukan kepada masyarakat. Dimana dengan adanya tata cara yang harus di tempuh maka akan dapat di lihat tingkat keefektivitasan sebuah program karena telah ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Tata cara yang ditempuh dapat berupa informasi persyaratan yang harus di bawa pada saat mengurus surat dan juga dapat berupa prosedural-prosedural.

Persyaratan pelayanan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) sudah disosialisasikan kepada setiap RT di desa Rapak Lambur, selanjutnya mereka menginformasikan kepada masyarakat yang berada di bawahnya untuk menyampaikan tata cara yang harus ditempuh atau persyaratan yang harus dibawa untuk membuat surat pengantar di kantor desa Rapak Lambur yaitu masyarakat harus menyertakan surat pengantar dari RT, Foto copy KTP, dan Kartu Keluarga. Selanjutnya apabila masyarakat datang tanpa membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kantor desa maka masyarakat tersebut tetap akan dilayani dengan hanya menyebutkan nama atau NIK dari masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan karena mudahnya aplikasi Si-Daleh sehingga tidak membuat pelayanan terhambat hanya dikarenakan persyaratan yang kurang dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak aparatur desa dan masyarakat, dapat disimpulkan tata cara yang harus di tempuh untuk menyelesaikan tugas sudah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat di

Desa Rapak Lambur. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui Ketua RT sehingga setiap masyarakat dapat mengetahui persyaratan yang perlu di persiapkan dalam mengurus urusan administrasi tersebut.

Prosedur pelayanan yang diberikan juga sangat sederhana dan mudah yang mengakibatkan pelayanan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) sangat efektif, dimana masyarakat yang ingin membuat surat datang ke kantor desa membawa persyaratan sesuai keperluannya, selanjutnya masyarakat menuju petugas, kemudian langsung diantar untuk dilayani dibagian kasi pemerintahan.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur**

#### ***Faktor Pendukung***

1. Infastruktur Komunikasi dan perangkat keras seperti komputer, wi-fi telah terpenuhi
2. Sumber daya manusia yakni Staf desa telah paham dalam pengoprasian Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) serta telah melakukan pelatihan

#### ***Faktor Penghambat***

1. Anggaran dana pengoprasiaan yang belum optimal dimana terjadi krisis anggaran sehingga pemerintah desa tidak bisa mengembangkan ke model On-line
2. Tidak terhubungnya aplikasi Si-Daleh dari desa Rapak Lambur dengan Diskominfo membuat Diskominfo sulit memantau perkembangan aplikasi Sidaleh di Desa Rapak Lambur.

### **Kesimpulan**

1. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur sejauh ini sudah sangat efektif. Hal ini dilihat berdasarkan pengukuran tingkat efektivitas menurut Siagian dimana pengukuran efektivitas meliputi : Sumber daya, dana dan fasilitas penunjang, mutu dan Jumlah barang atau jasa, Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, dan Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan. Adapun poin hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa:
  - a. Sumber daya manusia yakni staf desa telah mampu mengoperasikan dan menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur dimana sebelumnya telah dilakukan berbagai pelatihan kepada perangkat desa.
  - b. Sumber daya dana yakni persoalan anggaran operasional juga telah dibatasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sumbernya

- berasal dari APBD. Selain itu fasilitas penunjang juga telah terpenuhi dan sesuai standar dalam penerapan Aplikasi Si-Daleh ini.
- c. Persentase Mutu dan Jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setelah menggunakan Aplikasi Si-Daleh juga sangat efektif, dimana sepanjang Januari-April 2017 mutu dan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sebanyak 42 surat keterangan, dimana semuanya menggunakan Aplikasi Si-Daleh.
  - d. Batas waktu menghasilkan barang dan jasa setelah menggunakan Aplikasi Si-Daleh juga sangat efektif, setelah menggunakan Aplikasi Si-Daleh dalam pembuatan surat dan persyaratan administrasi hanya memakan waktu rata-rata 5-15 menit.
  - e. Tata cara yang harus ditempuh dan prosedur pelaksanaan untuk menyelesaikan tugas sudah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Rapak Lambur. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui Ketua RT.
2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur, dimana faktor pendukung tersebut yakni Infrastruktur Komunikasi dan perangkat keras seperti komputer, *wi-fi* telah terpenuhi untuk mendukung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) serta sumber daya manusia yakni staf desa telah memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh). Sedangkan faktor penghambat terletak pada Anggaran dana pengoperasian yang belum optimal dimana terjadi krisis anggaran sehingga pemerintah desa tidak bisa mengembangkan ke model Aplikasi Si-Daleh *On-line*.

### **Saran**

1. Sebagai bagian dari program *e-Government* penerapan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) di Desa Rapak Lambur perlu di kembangkan ke model *On-line*, dengan adanya pengembangan ini akan tercapai pelayanan yang lebih efektif dan memudahkan masyarakat, agar masyarakat bisa melakukan permohonan di mana saja.
2. Perlu melakukan kordinasi dan komunikasi kepada dinas terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk persolan anggaran pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) agar program Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) ini dapat ditingkatkan dan persolan anggaran dapat terselesaikan.
3. Program aplikasi Sistem Informasi Desan dan Kelurahan (Si-Daleh) bisa menjadi contoh untuk Desa dan Kelurahan lain yang belum menggunakan aplikasi ini agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Serta perlu adanya peningkatan anggaran yang harus diajukan oleh pemerintah desa Rapak Lambur kepada pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara untuk biaya operasional Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh).

### **Daftar Pustaka**

- Indrajit, Richardus, Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasalong, Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Buku Seru